

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara Agraris yang sedang berkembang yang mana sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Indonesia dan dengan hal itu tak heran bahwasanya profesi penduduk Indonesia mayoritas adalah petani. Sektor pertanian yang ada di Indonesia merupakan sumber daya esensial bagi kelangsungan hidup masyarakat. Hilang atau berkurangnya ketersediaan sumber daya alam tersebut akan berdampak terhadap kelangsungan hidup manusia. Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan Pembangunan Nasional. Ada beberapa hal yang mendasari mengapa pembangunan lahan pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, diantaranya potensi Sumber Daya Alam yang besar dan beragam terhadap pendapatan nasional yang cukup besar. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut, agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia tanpa mengorbankan kelestarian sumber daya alam itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa setiap pemerintah daerah diberi wewenang yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi guna terciptanya kesejahteraan masyarakat luas. Demi mencapai hal tersebut, maka daerah diberi hak dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri agar mampu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Bab XI tentang keuangan daerah, diketahui bahwa salah satu sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah pendapatan asli daerah (PAD), dimana dalam (PAD) terdapat pajak daerah dan retribusi daerah.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi pusat perhatian dalam pembangunan nasional, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil strategis terutama yang menyangkut komoditas pangan. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil produk pertanian ini diharapkan dapat dilakukan secara lebih terencana dengan pemanfaatan yang optimum serta dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia. Di lain pihak, luas lahan pertanian yang semakin sempit digilas oleh lahan perumahan dan lahan industri serta jumlah penduduk yang semakin tinggi berdampak terhadap sulitnya pemenuhan komoditas pangan khususnya dan kehidupan generasi yang akan datang pada umumnya. Oleh karena itu, masalah pertanian menjadi sangat kompleks karena berkaitan dengan hajat hidup masyarakat sekarang dan yang akan datang (Ufira Isbah, dan Rita Yani Iyan, 2016 : 45).

Pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian, yaitu dalam menyediakan kebutuhan bahan pangan yang

dibutuhkan masyarakat untuk menjamin ketahanan pangan, menyediakan bahan baku industri, dan sebagai pasar potensial bagi produk-produk yang dihasilkan oleh industri, sumber tenaga kerja dan pembentukan modal yang diperlukan bagi pembangunan sektor lain, sumber perolehan devisa, serta mengurangi kemiskinan dan peningkatan pangan dan menyumbangkan pembangunan pedesaan dan pelestarian lingkungan hidup (Harianto, 2007 : 1).

Sektor pertanian mempunyai kontribusi terbesar dalam meningkatkan pendapatan daerah sekaligus sebagai penggerak perkembangan sektor lainnya sehingga kesejahteraan penduduk dapat diwujudkan. Untuk itu dalam pembangunan pertanian wilayah Kabupaten Malaka memerlukan analisis penentuan sektor dan sub sektor unggulan apa saja yang dapat dikembangkan dan mendapat prioritas dalam pengembangannya. Sehingga pembangunan dapat dilakukan secara optimal karena dapat dilakukan optimasi penggunaan sumber daya yang ada.

Pengembangan dalam sektor pertanian harus mengantisipasi tantangan demokratisasi dan globalisasi untuk dapat menciptakan sistem yang adil. Selain itu harus diarahkan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera khususnya petani melalui pembangunan sistem pertanian yang mapan. Sistem tersebut harus berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralistik. Berdaya saing, berarti pertanian kita dapat disejajarkan dengan produk pertanian di daerah lain baik jumlah maupun kualitasnya. Berkerakyatan, berarti bahwa setiap usaha pembangunan pertanian harus mengikutsertakan petani supaya semakin berdaya sebagai subyek pembangunan. Berkelanjutan berarti pembangunan pertanian harus memberikan jaminan bagi keberlangsungan sektor pertanian, sedangkan terdesentralisasi

mempunyai makna bahwa pengembangan sektor pertanian juga harus berdasarkan aspirasi dan keinginan petani sesuai dengan kebutuhannya. Disini peranan pemerintah sangat dibutuhkan, contohnya mengeluarkan kebijakan-kebijakannya dengan tidak memberatkan petani.

Penyuluhan menjadi sarana kebijaksanaan yang efektif untuk mendorong pembangunan pertanian di dalam situasi petani tidak mampu mencapai tujuannya karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan. Pada umumnya sebagian besar petani kita banyak yang tidak sempat mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan formal, sementara harus disadari bahwa mereka merupakan pelaku utama dalam pembangunan pertanian, mengingat akan pentingnya hal ini, maka kebijakan pemerintah adalah menyediakan lembaga pendidikan nonformal yang digunakan sebagai sarana dan wahana untuk mengembangkan sumber daya manusia khususnya bagi petani-petani kita yang sedang menjalankan usaha tani, melalui pendidikan penyuluhan tersebut petani bisa belajar dan menemukan sesuatu yang baru sehingga bisa membawa perubahan ke arah positif dalam mereka menjalankan usaha tani. Pendidikan penyuluhan pertanian merupakan bentuk pendidikan nonformal yang disediakan bagi orang dewasa khususnya bagi petani kita yang merupakan pelaksana pembangunan pertanian dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang. Penyuluh pertanian memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam setiap diri petani, penyuluh pertanian memiliki tanggung jawab penuh terhadap petani sebagai pelaksana pembangunan pertanian dalam usaha menggali potensi-potensi yang ada dalam diri petani.

Petani memiliki empat kapasitas penting untuk pembangunan pertanian, yaitu: bekerja, belajar, berfikir kreatif, dan bercita-cita. Empat kapasitas tersebut merupakan modal pokok dalam menciptakan petani yang tangguh, kuat serta mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya sekaligus kesejahteraan orang-orang disekelilingnya dengan cara senantiasa berusaha meningkatkan hasil produksi dan pendapatan rumah tangga mereka.

Kabupaten Malaka merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi NTT yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengelola sumber daya alam pertanian demi mendorong pertumbuhan ekonomi guna terciptanya kesejahteraan masyarakat luas. Kecamatan Malaka Barat merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Malaka yang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pertanian yang sangat baik.

Desa Fafoe terletak di Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka dan Salah satu komoditas yang diusahakan di Desa Fafoe yaitu bawang merah. Komoditas tersebut banyak diusahakan oleh petani, sebab adanya ketersediaan lahan yang sesuai untuk pengembangan usahatani bawang merah. Iklim yang sesuai tersebut terlihat dari letak Desa Fafoe yang berdekatan dengan pantai, kondisi ini menyebabkan kelembaban udara yang rendah, selain itu pengembangan komoditas bawang merah dari segi budidaya pun dirasa lebih mudah baik dari awal pembibitan, perawatan hingga pelaksanaan pemanenan. Adanya pengalaman petani selama bertahun-tahun dalam pengembangan komoditas bawang merah juga merupakan salah satu alasan dalam pengembangan usahatani bawang merah di Desa Fafoe.

Hingga tahun 2020 Desa Fafoe memiliki 11 kelompok tani bawang yang didampingi oleh 1 orang penyuluh pertanian dengan luas lahan yang di olah rata-

rata kurang dari 1 hektar. Pengembangan usahatani bawang merah di Desa Fafoe tersebut tentunya tidak terlepas dari penyuluh pertanian yang terlibat didalamnya, akan tetapi penyuluh pertanian tersebut kurang kompleks. Kondisi tersebut diperparah dengan penyuluh pertanian yang belum melaksanakan perannya dan tidak memberikan dukungan secara maksimal, sehingga menyebabkan petani mengalami kesulitan dalam budidaya sampai pada pemasaran hasil panen bawang merah. Berikut ini akan disajikan keadaan kelompok tani dan penyuluh pertanian serta luas lahan yang dikelola oleh kelompok tani bawang merah di Desa Fafoe.

**Tabel 1.1**  
**Keadaan Kelompok Tani, Penyuluh Pertanian, Luas Lahan Kelompok Tani Bawang Merah di Desa Fafoe**

No	Kelompok Tani	Jumlah Anggota	Penyuluh	Luas Lahan (m <sup>2</sup> )	Ket
1	Kembang Melati	20 Orang	1 Orang	800	
2	Hamaus	20 Orang		550	
3	Fini Katara	20 Orang		600	
4	Tatiba	20 Orang		500	
5	Tiris Oan	20 Orang		650	
6	Hedan Manek	20 Orang		800	
7	Fukalaran	20 Orang		900	
8	Moris Foun	20 Orang		750	
9	Tua Tolus	20 Orang		700	
10	Moris Hamutuk	20 Orang		650	
11	Hatoman	20 Orang		850	

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **“Peran Penyuluh Pertanian Dalam Memberdayakan Kelompok Petani Bawang Merah” (Studi Kasus Pada Sentra Petani Bawang Merah di Desa Fafoe Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka).**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Penyuluh Pertanian dalam Memberdayakan Kelompok Petani Bawang Merah?.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Penyuluh Pertanian dalam Memberdayakan Kelompok Petani Bawang Merah.

#### **b. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian yang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian Ilmu Pemerintahan.
2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Malaka dalam melihat peluang dari potensi sektor pertanian di Kabupaten Malaka dan memperhatikan peran penyuluh pertanian dalam memberdayakan kelompok petani bawang Malaka.